**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti alasan efisien dan inefisien anggaran belanja daerah bidang kesehatan di Provinsi Kalimantan Barat baik secara teknis biaya maupun teknis sistem dan bertujuan untuk memberikan gambaran perbaikan input maupun output pada daerah yang inefisien agar bisa mencapai efisiensi. Objek penelitian ini adalah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Kurun waktu tahun 2012 hingga 2015. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif.

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Sanggau tidak efisien dikarenakan rasio jumlah perawatnya yang dibawah standar ideal, infrastruktur jalan yang tidak memadai dan produksi listrik yang rendah. Anggaran belanja daerah kesehatan yang tinggi juga menyebakan Kabupaten Sanggau tidak efisien secara teknis biaya. Sementara Kabupaten Kayong Utara bisa efisien dikarenakan anggaran belanja daerah kesehatannya yang rendah dan juga rasio jumlah perawat yang tinggi disebabkan oleh jumlah penduduk yang rendah. Kabupaten Kapuas Hulu bisa mencapai efisisensi teknis biaya dikarenakan rasio jumlah puskesmas yang tinggi dan juga produksi listrik yang tinggi. Kota Singkawang bisa mencapai efisiensi karena rasio jumlah perawat yang sangat tinggi, produksi listrik tinggi dan jalan yang rusak sedikit. Untuk daerah yang tidak efisien secara teknis sistem, seperti Kabupaten Sambas, Kabupaten Kayong Utara, dan Kabupaten Ketapang dikarenakan *outcome* berupa AHH masih rendah, distribusi air bersih yang rendah, dan AKB yang tinggi. Selain itu, wilayah Kabupaten Ketapang yang luas juga menyebabkan tidak efisien secara teknis sistem. Kabupaten Bengkayang bisa efisien dikarenakan memiliki AHH yang sangat tinggi, rasio jumlah puskesmas yang tinggi dan rasio jumlah perawat yang tinggi. Kabupaten Landak bisa mencapai efisiensi teknis sistem dikarenakan AHH yang tinggi dan AKB yang rendah. Kabupaten Kubu Raya bisa mencapai efisiensi karena AKB yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, jaraknya dekat dengan Ibu Kota Provinsi. Kota Pontianak bisa efisien karena AHH yang tinggi, AKB yang rendah, dan distribusi air bersih yang tinggi.

**Kata kunci: Efisiensi, DEA, Anggaran Belanja Bidang Kesehatan, Efisiensi Teknis Biaya, Efisiensi Teknis Sistem**

**DAFTAR PUSTAKA**

Adisamita, R. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah: Edisi Pertama.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kayong Utara. (2014). APBD *Murni Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2015*. Kayong Utara: BPKPD.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Melawi. (2014). APBD *Murni Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2015*. Melawi: BPKPD.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas. (2014). APBD *Murni Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2015*. Sambas: BPKPD.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau. (2014). APBD *Murni Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2015*. Sanggau: BPKPD.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Singkawang. (2014). APBD *Murni Kota Singkawang Tahun Anggaran 2015*. Singkawang: BPKPD.

Badan Pusat Statistik Bengkayang. (2013). *Bengkayang dalam Angka 2013.* Bengkayang: BPS.

 . (2014). *Bengkayang dalam Angka 2014.* Bengkayang: BPS.

 . (2015). *Bengkayang dalam Angka 2015.* Bengkayang: BPS.

 . (2016). *Bengkayang dalam Angka 2016.* Bengkayang: BPS.

Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat. (2013). *Kalimantan Barat dalam Angka 2013.* Pontianak: BPS.

 . (2014). *Kalimantan Barat dalam Angka 2014.* Pontianak: BPS.

 . (2015). *Kalimantan Barat dalam Angka 2015.* Pontianak: BPS.

 . (2016). *Kalimantan Barat dalam Angka 2016.* Pontianak: BPS.

Badan Pusat Statistik Kapuas Hulu. (2013). *Kapuas Hulu dalam Angka 2013.* Kapuas Hulu: BPS.

 . (2014). *Kapuas Hulu dalam Angka 2014.* Kapuas Hulu: BPS.

 . (2015). *Kapuas Hulu dalam Angka 2015.* Kapuas Hulu: BPS.

 . (2016). *Kapuas Hulu dalam Angka 2016.* Kapuas Hulu: BPS.

Badan Pusat Statistik Kayong Utara. (2013). *Kayong Utara dalam Angka 2013.* Kayong Utara: BPS.

 . (2014). *Kayong Utara dalam Angka 2014.* Kayong Utara: BPS.

 . (2015). *Kayong Utara dalam Angka 2015.* Kayong Utara: BPS.

 . (2016). *Kayong Utara dalam Angka 2016.* Kayong Utara: BPS.

Badan Pusat Statistik Ketapang. (2013). *Ketapang dalam Angka 2013.* Ketapang: BPS.

 . (2014). *Ketapang dalam Angka 2014.* Ketapang: BPS.

 . (2015). *Ketapang dalam Angka 2015.* Ketapang: BPS.

 . (2016). *Ketapang dalam Angka 2016.* Ketapang: BPS.

Badan Pusat Statistik Kubu Raya. (2013). *Kubu Raya dalam Angka 2013.* Kubu Raya: BPS.

 . (2014). *Kubu Raya dalam Angka 2014.* Kubu Raya: BPS.

 . (2015). *Kubu Raya dalam Angka 2015.* Kubu Raya: BPS.

 . (2016). *Kubu Raya dalam Angka 2016.* Kubu Raya: BPS.

Badan Pusat Statistik Landak. (2013). *Landak dalam Angka 2013.* Landak: BPS.

 . (2014). *Landak dalam Angka 2014.* Landak: BPS.

 . (2015). *Landak dalam Angka 2015.* Landak: BPS.

 . (2016). *Landak dalam Angka 2016.* Landak: BPS.

Badan Pusat Statistik Pontianak. (2013). *Pontianak dalam Angka 2013.* Pontianak: BPS.

 . (2014). *Pontianak dalam Angka 2014.* Pontianak: BPS.

 . (2015). *Pontianak dalam Angka 2015.* Pontianak: BPS.

 . (2016). *Pontianak dalam Angka 2016.* Pontianak: BPS.

Badan Pusat Statistik Sambas. (2013). *Sambas dalam Angka 2013.* Sambas: BPS.

 . (2014). *Sambas dalam Angka 2014.* Sambas: BPS.

 . (2015). *Sambas dalam Angka 2015.* Sambas: BPS.

 . (2016). *Sambas dalam Angka 2016.* Sambas: BPS.

Badan Pusat Statistik Sanggau. (2013). *Sanggau dalam Angka 2013.* Sanggau: BPS.

 . (2014). *Sanggau dalam Angka 2014.* Sanggau: BPS.

 . (2015). *Sanggau dalam Angka 2015.* Sanggau: BPS.

 . (2016). *Sanggau dalam Angka 2016.* Sanggau: BPS.

Badan Pusat Statistik Singkawang. (2013). *Singkawang dalam Angka 2013.*Singkawang: BPS.

 . (2014). *Singkawang dalam Angka 2014.* Singkawang: BPS.

 . (2015). *Singkawang dalam Angka 2015.* Singkawang: BPS.

 . (2016).*Singkawang dalam Angka 2016.* Singkawang: BPS.

Daling, M. (2013). Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal EMBA, 1* (3), 82-89.

Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara, (2016). *Profil Kesehatan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015*, Kayong Utara. Dinkes.

Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, (2015). *Profil Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014*, Kubu Raya. Dinkes

Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, (2016). *Profil Kesehatan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015*, Kubu Raya. Dinkes

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, (2013). *Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012*, Pontianak. Dinkes.

 , (2014). *Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013*, Pontianak. Dinkes.

 , (2015). *Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014*, Pontianak. Dinkes.

 , (2016). *Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015*, Pontianak. Dinkes.

Dumairy. (1996). *Perekonomian Indonesia.* Yogyakarta: Erlangga.

Efendi, F., & Makhfudli. (2009). *Keperawatan Kesehatan Komunitas Teori dan Praktik dalam Keperawatan.* Jakarta: Salemba Medika.

Fahrianta, R. E. (2012). *Ananlisis Efisiensi Anggaran Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas. Jurnal Manejemen dan Akuntansi, 13* (1), 57-72.

Hakimudin, D. R. (2010). *Analisis Efisiensi Belanja Kesehatan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah* (skripsi), Universitas Diponegoro, Indonesia.

Hariadi,. Restianto,. & Bawono. (2010). *Pengelolaan Keuangan Daerah.* Jakarta: Salemba Empat.

Indriati, N. E. (2014). Analisis Efisiensi Belanja Daerah di Kabupaten Sumbawa (Studi Kasus Bidang Pendidikan dan Kesehatan). *JESP, 6* (2), 192-205.

Jafarov, E., & Gunnarson, V. (2008). Government Spending on Health Care and Education in Croatia: Efficiency and Reform Options. *IMF Working Paper, WP/08/136,* 1-34.

Karianga, H. (2017). *Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah: Perspektif Hukum dan Politik*. Depok: Kencana.

Kurnia, A. S. (2006), Model Pengukuran Kinerja dan Efisiensi Sektor Publik Metode Free Disposable Hull (FDH). *Jurnal Ekonomi Pembangunan.* 11 (2), 1-20. Semarang: Universitas Diponegoro.

Mangkoesoebroto, G. (1993). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Mardiasmo. (2002). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga.

Muljarijadi, B. (2017). *Pembangunan Ekonomi Wilayah: Pendekatan Analisis Tabel Input-Output.* Bandung: UNPAD PRESS.

Pangkey, I., & Pinatik, S. (2015). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA, 3* (4), 33-43.

Pertiwi, L. D. (2007). Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Ekonomi Negara Berkembang,12* (2), 123-129.

Rapiuddin., & Rusydi, B. U. (2017). Efisiensi Belanja Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan. *Economics, Social, and Development Studies, 4* (1), 23-39.

Reksohadiprodjo, S. (2001). *Ekonomika Publik Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Rusydiana, A. S., dkk. (2013). *Mengukur Tingkat Efisiensi dengan Data Envelopment Analysis (DEA): Teori dan Aplikasi.* Bogor: SMART Publishing.

Sukirno, S. (2000). *Pengantar Teori Makroekonomi.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

 . (2007). *Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru.* Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada.

Summapouw, O. J, & Roebijoso, J. (2017). *Pembangunan Wilayah Berwawasan Kesehatan*. Yogyakarta: Deepublish.

Spillane, J. J. (2010). *Ekonomi Farmasi.* Yogyakarta: Grasindo.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2004). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Kedelapan.* Jakarta: Erlangga.

Umar, H. (2000). *Bussines an Introduction.* Jakarta: Gramedia Putaka Utama.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah.* Yogyakarta: Deepublish.

Yatiman, N., & Pujiyono, A. (2013). Analisis Efisiensi Teknis Anggaran Belanja Sektor Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008-2010. *Diponegoro Journal of Economics, 2* (1), 1-3.

Zulyanto, A., Noerani, A. A., Badriah, L. S., & Istikomah, N. (2014). *Pencapaian MDGs di Indonesia.* Bandung: UNPAD PRESS.

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>. Diakses tanggal 23 Februari 2018.

<https://kalbar.bps.go.id/dynamictable/2017/03/22/63/umur-harapan-hidup-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-kalimantan-barat-2010-2017.html>. Diakses tanggal 26 februari 2018.